

Turki di antara Qatar dan Mesir: Analisis Hubungan Diplomatik Pasca Arab Spring 2011

Abdi Zakaria Zulkhair

Sakarya University, Turkey

Corresponding Author: zackelbanjary@gmail.com

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk mengungkapkan problematika hubungan bilateral antara Qatar, Mesir dan Turki dengan bermacam dinamika politik internasional yang terjadi. Hubungan ketiganya relatif aman pada dekade 2000 an dan menunjukkan pergolakan ketika adanya gejolak politik dan Arab Spring. Untuk mengungkapkan permasalahan dari ketiga negara, digunakan teori neorealisme dan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa revolusi Mesir 2011 mengubah banyak hubungan bilateral, baik antara Turki dan Mesir ataupun Qatar dan Mesir. Setelah adanya peristiwa kudeta Presiden Mursi yang didukung penuh oleh Turki dan Qatar membuat hubungan diplomatik terkendala. Krisis teluk pada 2017 juga memperumit permasalahan antara ketiga negara tersebut. Namun di akhir tahun 2022, tepat pada acara pembukaan piala dunia, Qatar sebagai tuan rumah memulai mediasi antara Mesir dan Turki, yang dinilai sebagai titik awal perubahan diplomasi antara ketiga negara tersebut.

Kata Kunci: Arab Spring, Qatar, Teluk, Turki, Kudeta, Mesir, IM, Embargo, Timur Tengah.

ABSTRACT

This paper tries to explain the relations of three influential countries in the Middle East Qatar, Egypt and Turkey. The relations of the three were relatively safe in the decade of the 2000s and showed turmoil. To reveal the problems of the three countries, neorealism theory and qualitative descriptive methods are used. Based on the analysis, it can be concluded that the Egyptian Revolution in 2011 changed many bilateral relations, both between Turkey and Egypt or Qatar and Egypt. After President Morsi's coup incident which was fully supported by Turkey and Qatar strained diplomatic relations. The 2017 Gulf crisis also exacerbated problems between the three countries. But at the end of 2022, the event the opening of the world cup, Qatar as the host began mediation between Egypt and Turkey, which was considered the starting point for a change in diplomacy between the three countries. This paper tries to explain the problems of bilateral relations between Qatar, Egypt and Turkey with various international political dynamics that occur.

Keywords: Arab Spring, Qatar, Bay, Turki, Overthrow, Egypt, IM, Embargo, Middle East.

Article History: Submitted: 29 January 2023 | Accepted: 29 July 2023 | Available Online: 31 July 2023

PENDAHULUAN

Turki adalah negara yang terletak di kawasan Asia – Eropa dan sebagian wilayah masuk ke dalam Timur Tengah. Negara ini mempunyai hubungan internasional,

pertukaran budaya, dan sejarah geopolitik yang panjang dengan Mesir dan Qatar. Sejak zaman Ottoman menaklukkan Dinasti Mamluk di tanah Arab abad 15, Mesir dan Qatar adalah salah satu dari provinsi kesultanan. Sejarah mencatat bahwasanya Qatar modern bermula pada tahun 1766 ketika keluarga khalifah bermigrasi menuju semenanjung dan pemukiman mereka di kota al-Zubarah menjadi pusat perdagangan mutiara (Anthony, 2022). Adapun Ottoman yang sudah berkuasa sejak abad 16 di daerah Irak dan Kuwait secara resmi menganeksasi Qatar pada tahun 1871 karena kedekatannya dengan salah satu provinsi Ottoman Al-Hasa di dekat daerah Nejad. Kendali Turki Usmani pada Qatar dan wilayah sekitarnya melemah karena kekalahan mereka pada perang dunia pertama dan secara resmi Inggris menjajah Qatar pada 1916 (Mofa- Qatar, 2022).

Sejak kedatangan Sultan Selim pada tahun 1517, Mesir dijadikan sebagai wilayah *Vilayet* atau provinsi Ottoman. Mesir menjadi provinsi yang penting dan menjadi wilayah otonom sejak Muhammad Ali Pasha menjadi Gubernur. Sejak tahun 1841, sesuai dengan perjanjian London, Usmani memberikan hak prerogatif keturunan Muhammad Ali Pasha sebagai penyambung kekuasaannya di Mesir (Cleveland, 2013: 74). Hubungan Sultan Mahmud II dengan gubernurnya Muhammad Ali Pasha dibidang saling membantu. Hal ini terbukti dengan diutusnya pasukan untuk menumpas pemberontakan Wahabi di Nejad pada tahun 1811 dan pemberontakan Yunani pada tahun 1827 (Cleveland: 71). Hubungan Turki Usmani dan Mesir berakhir sejak penjajahan Inggris yang menjadikan Mesir sebagai wilayah protektorat tepat sebelum terjadinya perang dunia pertama.

Pada abad ke 20, ketiga negara ini telah merdeka dan bekerjasama dengan baik. Sejak pemerintahan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) tahun 2003 atau yang dikenal *The Justice and Development Party*, Turki memiliki misi untuk mengendalikan Timur Tengah. Turki sebelum diperintah oleh AKP memang terkesan menjauh dari diplomasi dan percaturan politik di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan beberapa sebab: Pertama, faktor pemerintahan yang berkiblat ke Barat. Saat Turki dikuasai oleh partai nasionalis CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yang didirikan Mustafa Kemal, orientasi negara selalu berusaha untuk masuk ke dalam anggota Uni Eropa, dan menjadikan Turki sebagai negara yang setara dengan Barat. Kedua, sebagai Anggota NATO negara Turki cenderung berfokus pada permasalahan regional Barat dan kebijakan politik NATO sangat berpengaruh pesat dalam kebijakan luar negeri Turki. Ketiga, fokus utama pertumbuhan negara ini bertumpu pada Eropa. Sejak berdirinya negara sekuler Turki, Mustafa Kemal

lebih memfokuskan untuk pembangunan negara dan ekonomi Turki sendiri. Ia terkesan menutup diri dengan isu-isu yang berhubungan dengan Timur Tengah dan Negara Muslim.

Semua hal tersebut berubah sejak pemerintahan Erdogan yang Islam, modernis, dan konservatif. Negara ini tidak lagi mengiklaimkan Eropa sebagai tujuan utama kekuatan politik dan ekonomi. Mantan PM Turki Ahmet Davutoglu menegaskan bahwa Turki sudah berbenah dan harus menjadi *main role* dalam kancah internasional yang dilandasi oleh geopolitik, sejarah, dan posisi Turki sangat unik dengan letak geografisnya yang langsung bersentuhan dengan Timur Tengah. (Davutoglu, 2001:34). Turki menjadi *role* untuk sebuah negara Islam yang sukses dalam bermoderasi dan berdemokrasi. Dalam kaitannya dengan Mesir dan Qatar, tentu Turki tidak akan menyiakan kesempatan untuk memperluas hubungan bilateral tersebut, khususnya dengan begitu banyaknya kaitan sejarah dan agama antara tiga Negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian terkait perubahan pemerintahan Turki serta hubungan problematika dengan Mesir dan Qatar menarik untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan perspektif neorealisme dari sisi geopolitik dan konflik politik sehingga diharapkan dapat menambah wawasan hubungan internasional pada negara-negara Timur Tengah.

Penelitian terkait hubungan internasional antara negara Turki, Qatar, dan Mesir telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hani Fatunnisa (2020) dengan “Analisis Penguatan Hubungan Qatar-Turki Selama Krisis Teluk 2017”. Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa sikap Turki mendukung Qatar tidaklah selalu merugikan meskipun berada di dalam tekanan negara kuartet. Karena pasca krisis, Turki semakin menancapkan pengaruhnya di Qatar dan menjadi salah satu aktor yang berpengaruh dalam permasalahan di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mas’udi Budiana (2015) yang berjudul “Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah Adalet Ve Kalkinma Partisi (Akp) Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Turki yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi; 1) AKP menguasai parlemen Turki, 2) Perubahan doktrin politik luar negeri Turki, 3) Dukungan rakyat Turki terhadap Presiden Mursi, 4) Faktor sejarah Turki. Sedangkan faktor eksternal

meliputi; 1) Presiden Mursi terpilih secara demokratis, 2) Penggunaan cara represif yang dilakukan oleh militer Mesir, 3) Kesamaan kepentingan antara Turki-Mesir terhadap isu Palestina dan 4) Masyarakat internasional tidak segera bersuara dan menentukan sikap yang tegas terhadap kudeta Mesir.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, metode studi pustaka digunakan untuk mencari data sekunder dari beberapa sumber literatur seperti jurnal, buku, internet dan media *online* kredibel yang membahas tentang hubungan negara Turki, Mesir dan Qatar secara geografis, budaya, sejarah, politik, dan hubungan bilateral. Data tersebut disesuaikan dengan judul tema yang telah dipilih. Adapun data primer dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan perspektif teori Neorealisme untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan dinamika politik dalam dan luar negeri, khususnya pasca Arab Spring 2011 yang mempengaruhi hubungan diplomasi antar negara tersebut.

Pengaruh geopolitik yang berkembang pasca Arab Spring sangat dinamis menjadikan hubungan antara ketiganya yang selalu berubah memacu untuk meleburkannya dalam teori Neorealisme. Dalam Perspektif Neorealisme sebagai salah satu teori dalam hubungan internasional yang mana hadir sebagai antitesis dari teori Realisme klasik. Menurut Neorealisme, struktur tata dunia yang anarki mempengaruhi sikap negara untuk berbuat agresif dalam banyak hal. Ketidakpastian dalam politik internasional menjadikan setiap negara berusaha untuk menggapai kekuatan dan pengaruh politik seluas mungkin, dalam hal ini kekuatan Militer dan ekonomi menjadi peran utama dalam berpolitik dan bernegara (Dugis, 2018: 107). Berdasarkan argumen ini dalam tulisan ini akan memaparkan hubungan Turki, Qatar dan Mesir dalam perspektif analisis Neorealisme. khusus pada periode pasca Arab spring 2011 dan krisis teluk 2017 yang mana banyak mengangkat dinamika politik internasional yang berubah setiap waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Turki dan Qatar Sebelum Arab Spring

Pada awal berkuasanya AKP pada tahun 2003, Turki telah memulai hubungan baik dengan negara Qatar. Pemerintahan Turki mengambil langkah inovatif dalam kebijakan-kebijakan serta membuat misi untuk membangun relasi baik dengan negara

Arab. Turki sudah tidak memfokuskan diri menjadi anggota uni Eropa, dibuktikan dengan banyaknya kunjungan Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2005, 2008 dan 2010, dan kunjungan balik Syekh Hamad pada 2009. Hal ini berkesinambungan dengan adanya kebijakan luar negeri Qatar yang disebut *Hamadian Foreign Policy* yang memiliki misi untuk menjadi mediator dalam setiap konflik regional yang ada di Timur tengah (Fromherz, 2017). Langkah keduanya ini terbukti dengan Turki menjadi negara pertama bersama *Gulf Cooperation Council* (GCC) dalam mengadakan dialog strategi pada 2 September 2008, yang disusul dengan perjanjian perdagangan bebas antar negara, dialog kesepakatan dalam politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan budaya, di tahun yang sama (MFA Turki, 2022). Hal ini dikarenakan para negara teluk merasa lebih dekat bekerjasama dengan negara turki yang Sunni untuk menangkal pengaruh Iran di sisi lain Turki tidak ada kepentingan berlebih dilihat dari sisi geografis yang jauh dari teluk.

Secara geopolitik, Peran Qatar yang memiliki cadangan minyak dan gas besar di wilayah Timur Tengah dapat memicu adanya konflik yang diistilahkan *Transboundary resource disputes* (Setiawaty, 2022). Turki dan Qatar pada dekade antara 2002-2010 dianggap sebagai *role model* negara Islam yang moderat, mandiri dan kuat secara ekonomi, yang bisa membawa pengaruh positif pada negara muslim yang lain di abad modern. Hal ini sesuai dengan misi Ankara dan Doha sebagai mediator dan juru damai dalam konflik yang terjadi di berbagai negara Arab. Hal ini dibuktikan dengan peran keduanya dalam permasalahan yang terjadi seperti: Turki yang menjadi mediator antara Israel dan Palestina pada konflik yang terjadi 2008, permasalahan Lebanon dan Iraq dan mediasi antara Iran dan Barat, begitu juga dengan Qatar yang menjadi mediator pada permasalahan Libya dan Amerika serta UK. Permasalahan Lebanon dengan Hizbullah, konflik Yaman dan Houthi, konflik Algeria dan Maroko, serta mediasi antara Hamas, Fatah dan Israel dalam konflik palestina. Kesamaan visi pada diplomasi luar negeri inilah yang menjadikan pemerintahan Turki dan Qatar memiliki kedekatan yang lebih.

Relasi Turki dan Mesir

Relasi Turki dan Mesir memang mengalami banyak perubahan terutama selepas jatuhnya Turki Usmani dan disaat Mesir masih berbentuk kerajaan di bawah dinasti Muhammad Ali. Pengaruh Turki sebagai budaya dan kultur kerajaan masih banyak ditemukan karena Raja Faruk yang bertakhta di Mesir adalah keturunan Muhammad Ali Pasha yang juga sebagai pejabat besar Turki Usmani. Sebelum berbentuk kerajaan

independen, Kerajaan Mesir adalah salah satu bagian dari Provinsi Ottoman yang berpusat di Istanbul. Namun datangnya abad modern membuat kedua negara fokus dalam pembangunan masing-masing. Sejak sistem kerajaan dihapuskan dan didirikannya Negara Republik Mesir, hubungan bilateral keduanya sedikit ditemukan dalam catatan sejarah. Turki yang sudah menjadi Republik lebih menutup diri terhadap Timur Tengah dan lebih berfokus kiblata budayanya ke ranah Eropa.

Namun pasca revolusi 1952 hingga runtuhnya rezim Mubarak pada tahun 2011, terlihat adanya singgungan hubungan diplomatik antara keduanya terutama yang berkaitan dengan fakta Baghdad. Aliansi ini dilandaskan fakta kerja sama militer di Timur Tengah antara Irak, Turki, Iran, Inggris Raya, dan Pakistan yang didukung Amerika Serikat dan negara Barat untuk mengimbangi pengaruh Nasser yang beraliran pro sosial didukung Uni Soviet. Turki yang saat itu dipimpin PM Adnan Menderes berusaha untuk mengajak negara di Timur Tengah untuk masuk ke dalam aliansi fakta Baghdad (Laciner, 2011: 135). Namun aliansi ini gagal setelah runtuhnya kerajaan Iraq Hasyimiyah yang dikudeta oleh para prajurit yang mendukung Nasser dan partai Bath pada tahun 1958. Nasser berhasil melebarkan politik persatuan Arab sosialisnya.

Hubungan Turki dan Mesir relatif normal di era Mubarak pada tahun 2005. Kedua negara menyepakati adanya pembebasan visa dengan tujuan untuk meningkatkan neraca perdagangan. Hal ini terbukti pada tahun 2001 ekspor Mesir ke Turki senilai 91 juta USD meningkat menjadi 255 juta USD pada tahun 2005. Begitu juga nilai ekspor Turki bernilai 421 juta USD menjadi 473 USD dengan tahun yang sama (Meral, 2014). Pada tahun 2007 kedua negara menandatangani MOU kerjasama strategis yang berimplikasi pada peningkatan tiga kali lipat volume perdagangan yang bermula 1,1 miliar USD menjadi 3,2 Miliar USD di tahun 2010 (Szalanka: 2011).

Sejak memulai era barunya, di awal masa pemerintahan AK Party, pemerintahan yang berideologikan Muslim moderat dan konservatif memiliki hubungan yang baik dengan kaum Islamis di Mesir. Turki bersama Qatar memiliki pola gerakan yang sama untuk mendukung Gerakan Islam di Timur Tengah. Hal tersebut menjadi masalah bagi negara seperti Saudi dan Uni Emirat Arab setelah Arab Spring. Namun melihat jejak sejarah Turki, pada dekade 80an Ikhwan Muslimin atau *Muslim brotherhood* yang berasal dari Mesir memiliki kedekatan secara spiritual dan politik dengan partai Refah yang didirikan Necmettin Erbakan. Mereka hadir dalam keadaan politik Turki yang berusaha

melawan gelombang partai kiri, kubu militer berusaha untuk menggandeng kelompok islamis. Hal ini menguntungkan partai Refah dan Gerakan islamis lainnya. Hal tersebut terbukti dengan dilantikannya Erbakan menjadi wakil perdana menteri pada tahun 1980 dan berhasil memenangkan pemilihan pada tahun 1995 sebagai perdana menteri hingga tahun 1998 dan Recep tayib Erdogan sebagai Walikota Istanbul tahun 1995. Hasan al Banna sebagai penggagas kelompok Ikhwanul Muslimin banyak menginspirasi Gerakan islamis di dunia muslim. Begitu juga AK parti yang didirikan Erdogan banyak terinspirasi Gerakan islamis dan moderasinya di Mesir.

Pengaruh Bilateral Pasca Arab Spring 2011

Gejolak Revolusi yang disebut dengan Arab Spring membentang dari Afrika Utara hingga ke Yaman. Negara-negara Arab yang didominasi pemerintahan diktatoris telah mencapai batasnya. Selama beberapa dekade, negara-negara Arab telah terbiasa dengan kendali kontrol pemerintahan diktator ataupun rezim militer. Namun seiring perubahan zaman, ketimpangan sosial dan krisis ekonomi membuat rakyat mulai jenuh dengan pemerintah yang terlalu lama berkuasa. Arab Spring pertama kali terjadi di Tunisia dengan peristiwa bakar diri Mohamed Bouazizi. Hal tersebut memicu demo besar rakyat Tunisia dengan tuntutan pelengseran Presiden Tunis Rezim Ben Ali (Onion, 2018). Pada rentan tahun 2010-2011, peran sosial media muncul seperti Twitter, Facebook dan Youtube yang menjadi senjata utama Arab Spring untuk menyebarluaskan informasi dan mobilisasi masa untuk mencapai revolusi.

Arab Spring juga terjadi di Mesir ketika jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak yang telah berkuasa beberapa akhir dekade dengan adanya revolusi Arab. Pemerintahan Mesir sementara diisi oleh SCAF (Supreme council of Armed Forces). Pemilu dilaksanakan pada Juni tahun 2012 dan dimenangkan oleh presiden demokrasi pertama, yaitu Muhammad Morsi. Ia telah mengalahkan rivalnya Ahmed Shafiq dengan perbandingan suara 51,73 persen (Britannica: Augustyn, 2022). Kemenangan tersebut menjadikan Gerakan Ikhwan Muslimin meraih puncak kekuasaan pemerintahan di Mesir. Hal ini mendapat respons yang positif dari Turki dan Qatar yang dikenal sebagai mitra yang baik dengan Gerakan Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin.

Di antara tahun 2011 dan 2013, Turki dan Qatar melakukan investasi yang masif untuk mendukung gerakan revolusi pada negara-negara Arab yang terimbas Arab Spring. Kedua negara ini menjadikan Ikhwanul Muslimin menggapai puncak kekuasaan dengan

perpaduan pemerintahan demokrasi dan Islam moderat, seperti yang terjadi di Mesir dengan partai kebebasan dan keadilannya dan Tunis dengan partai *Annahdah*. Kedua negara tersebut memang sejak 2011 mempunyai misi yang sama untuk mengangkat nilai keislaman dalam politik dan pemerintahan negeri Arab, karena dengan langkah tersebut memudahkan untuk menjalin kerja sama. Keduanya mendukung banyak Gerakan Revolusioner dan Islamis ini melalui diplomasi politik, finansial, dan persenjataan (Roberts, 2017: 71). Namun di sisi lain, langkah ini mendapat tantangan dari negara teluk lain, seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, dan Bahrain, karena dinilai sangat berbahaya bagi keberlangsungan politik regional dan pemerintahan yang otoriter maupun kerajaan.

Di antara dinamika Arab Spring, revolusi di negara mengalami tantangan dari kubu Saudi dan Uni Emirat Arab. Pada kasus Mesir, kubu Saudi dan Uni Emirat Arab mendukung gerakan sekuler anti Islamis yang berposisi melawan pemerintahan Morsi, sedangkan pemerintahan Morsi mendapat dukungan penuh dari Qatar dan Turki (Dalam Robert: 14). Permasalahan memuncak pada kudeta Juli 2013 yang menggulingkan pemerintahan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hal ini menjadi pukulan yang berat bagi pemerintahan Ankara dan Doha sebagai pendukung utama Ikhwanul Muslimin. Di sisi lain, Turki dan Qatar mendapat tekanan dari Saudi dan Mesir untuk memulangkan kader Ikhwanul Muslimin yang berlindung di negara Turki dan Qatar. Walaupun pemerintahan Erdogan hanya bisa mengecam kudeta tersebut dan menuduh adanya peran barat serta Amerika Serikat dalam keberhasilan Presiden Sisi, di sisi lain Ankara tetap menjalin hubungan baik dengan negara teluk pasca kudeta Juli 2013 (Baskan, 2019: 16-62).

Permasalahan IM (Ikhwan Muslimin) antara Ankara, Doha, dan Cairo

Gerakan IM (Ikhwan Muslimin) menjadi salah satu pemicu masalah antara Qatar dan Mesir, dan Turki. Ideologi *Ikhwan* yang diprakarsai Hasan Al Banna memang selalu menjadi lawan dalam politik militer di Mesir. Pro akan keadilan dan demokrasi namun negara tetap dibangun atas landasan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep negara sekuler atau sosialis ala Nasser. Namun di sisi lain ideologi ini juga mempunyai ranah radikal apabila berkiblat ke pemikiran Sayyid Qutb salah seorang pemimpin IM pada masa lampau. Ini lah yang ditakutkan Militer Mesir sebagai garda terdepan penjaga keamanan negara. Namun di sisi lain, kudeta militer terhadap Morsi tidak hanya meruntuhkan demokrasi yang sudah dibangun sejak 2011, namun juga mengembalikan

negara tersebut dalam jurang otoriter dan diktator. Jenderal Abdul Fattah Sisi tidak hanya mengukudeta presiden Morsi namun juga melabeli Ikhwan muslimin sebagai organisasi teroris pada Desember 2013 dan membekukan seluruh asetnya di seantero negeri Pyramid tersebut (Abdul Aziz: Almasry, 2013).

Dengan dilarangnya Gerakan Ikhwan Muslimin banyak para kader organisasi ini menjadi pelarian di negara Turki dan Qatar. Gerakan diplomasi Turki pertama ialah secara resmi memulangkan duta besar perwakilan Turki di Kairo pada tahun 2013 dan menjadikan status diplomasi menjadi *charge d'affaires* level (Magued,2018: 480). Di pihak Qatar lebih lunak dalam menanggapi isu kudeta tersebut, bahkan secara resmi pemerintah memberikan selamat kepada pemerintahan transisi di waktu itu. Namun di sisi lain, Qatar yang memiliki Perusahaan Media AlJazeera menjadi pelopor kritik terhadap kekerasan yang terjadi antara pemerintah militer dan Ikhwanul Muslimin di lapangan Rabia (Reuters, 2014). Hal ini menjadikan pemerintahan Sisi geram akan langkah media Aljazeera, dikarena konsistensinya dalam meliput kekerasan dan kritis terhadap rezim militer di Mesir.

AlJazeera sebagai media terbesar di Qatar bagaikan sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan rezim militer di Mesir, seperti yang kita ketahui *broadcast* AlJazeera tidak hanya berbahasa Arab namun juga memiliki versi Bahasa Inggris dan internasional. Seluruh pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Sisi yang terus disuarakan media ini membuat kantor AlJazeera secara resmi ditutup dan banyak jurnalisnya ditangkap tanpa pengadilan yang jelas. Seperti yang dilansir media ini, rezim militer Sisi dikecam akan penahanan Ratusan kelompok HAM dan 20 jurnalis dengan tuduhan penyebaran berita palsu. Mesir dengan pemerintahan Sisi menempati peringkat buruk 168 dari 180 negara dalam Index kebebasan pers (MEMO, 2022).

Krisis Teluk 2017

Saudi Arabia, Bahrain, dan UEA didukung penuh oleh Mesir dan Yaman melakukan gerakan yang mengejutkan bagi Qatar dan sekutunya Turki. Tepat pada 5 Juni 2017, kelima negara tersebut memutuskan hubungan diplomatik dan menarik dubes mereka dari Qatar dan juga bersepakat untuk memblokade Qatar dari berbagai arah dari perbatasan laut dan darat, baik secara ekonomi, politik dan hubungan internasional. Hal ini disebabkan adanya asumsi bahwasanya Qatar terus melakukan manuver dalam internal politik negara negara Timur Tengah sejak dilanda Arab Spring, dengan

mendukung kelompok Islamis terutama Ikhwanul Muslimin yang memang dicap sebagai organisasi terlarang oleh Mesir dan Saudi Arabia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ex- Ikhwan yang menetap di Qatar, termasuk Syekh Yusuf Qardhawi sebagai pembesar IM bebas bergerak melakukan aktivitas dan menyampaikan pidato politiknya dari Menara Doha. Peran AlJazeera sebagai media Qatar yang sangat provokatif dalam memberitakan masalah politik dan ikhwanul muslimin di Mesir dan Saudi (Aljazeera, 2018).

Tentunya hal ini sangat merugikan terutama bagi Mesir dan Saudi. Muhammad Bin Salman sebagai juru kunci embargo ini menilai langkah politik luar negeri Qatar telah melanggar kesepakatan bersama dalam forum GCC yang dapat membahayakan stabilitas negara Arab dan khusus negara teluk di segala perbatasannya (K.Harb, 2021). Namun diduga adanya gerakan sepihak yang dipimpin Saudi ini dengan berani karena adanya dukungan besar dari Amerika Serikat yang sehari sebelumnya Donald mengunjungi MBS di Riyadh. Di sisi lain adanya proyek Donald Trump untuk mengusulkan *Abraham Accords* bagi kesepakatan negara teluk dan Israel menjadi salah satu sebab dinamika embargo ini. Blokade yang dilakukan pihak Saudi dan Mesir dan lainnya tentunya merugikan bagi Qatar namun blokade ini direspons dengan baik dengan adanya sokongan dari Turki dan Iran dan Kuwait sebagai negara mediator untuk penyelesaian konflik tersebut.

Turki merupakan negara pertama yang sebenarnya menawarkan sebagai mediator bersama Kuwait untuk penyelesaian krisis teluk ini lewat jalur diplomasi. Namun di kemudian hari Turki terlihat mendukung penuh Qatar dalam kasus ini. Terlihat dengan aksi pemerintahan Erdogan memasok berton-ton bahan makanan ke Doha karena Qatar adalah negara konsumtif yang sangat bergantung dari makan importir. Setelah blokade diumumkan, Parlemen Turki mengesahkan undang-undang untuk menambah pasukan militer Turki di Qatar. Acara dilanjutkan dengan Latihan Bersama yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sebagai uji coba pameran kekuatan. (Sujibto, 2017).

Aksi yang dilakukan Qatar dan Turki ini pastinya menjadi bumerang bagi Saudi dan Mesir yang berinisiatif melakukan embargo tersebut. Disisi Mesir sendiri sebagai negara yang didalam-Nya Ikhwan Muslimin sangat setuju dan mendukung penuh Gerakan embargo Saudi ini Karena di sisi lain, Mesir sangat bergantung terhadap Arab Saudi dalam politik dan ekonomi, pertama disebabkan krisis ekonomi dan inflasi yang

parah sejak awal pemerintahan sisi , kedua Mesir masih dalam tahap recovery pasca revolusi 2011 dan 2013 yang membuat stabilisasi negara yang labil, ketiga Mesir membutuhkan investasi besar besaran dari Saudi sebagai proyek ibukota kairo Terbaru versi Jenderal Abdul Fattah sisi (Abu Zaid, 2022), dan yang terakhir Mendukung penuh pemblokadean Qatar untuk memberantas sisa pengaruh Ikhwanul Muslimin dan peran propaganda Media Qatar di negara tersebut.

Melihat dari krisis teluk ini maka bisa dilihat bahwasanya Qatar melakukan gerakan perlawanan dalam menyikapi Embargo Saudi, Mesir dan anggotanya. Berdasarkan teori Neorealisme klasik, sikap Qatar yang mencari aliansi kepada Turki merupakan suatu gerakan politik internasional yang agresif demi mempertahankan negara nya dari situasi politik dunia internasional, khususnya kawasan teluk yang tidak pasti. Begitu juga hal nya dengan Turki, berdasarkan teori tersebut negara Qatar bukan hanya semata faktor kedekatan namun adanya keinginan untuk memperluas pengaruh kekuatan Turki di dunia Timur tengah secara politik maupun Ekonomi. Aliansi Qatar-Turki berhasil dalam menahan gelombang embargo. Di sisi lain, Qatar terbukti sukses keluar dari krisis politik teluk 2017 dibuktikan dengan berhentinya embargo tersebut dengan tidak adanya kesepakatan Qatar memenuhi tuntutan Saudi dan aliansinya, serta konflik ini berakhir mulus dibuktikan dengan hadirnya kepala negara pemacu embargo tersebut seperti Saudi, Mesir cs. dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, duduk bersama dan berjabat tangan dengan mesra antara Emir Qatar dan President Erdogan.

KESIMPULAN

Dinamika geopolitik inovatif akan berubah sesuai kondisi, zaman, serta kepentingan, antara Turki, Mesir dan Qatar. Perubahan terjadi di beberapa Event sepanjang 2021-2022. Embargo terhadap Qatar merupakan suatu dinamika yang elastis, terbukti hingga hari ini krisis ini pun berakhir tanpa adanya kerugian yang banyak dari pihak Qatar. Syekh Al Tamimi sebagai pemimpin Qatar berhasil mengonter embargo ini dengan melakukan berbagai macam diplomasi tingkat tinggi, baik terhadap Amerika Serikat, NATO, Rusia, Turki, dan Iran. Di sisi lain, dunia memang mengakui bahwa sumber daya alam: gas dan cadangan minyak Qatar adalah suatu peran yang penting bagi ekonomi dan investasi di negara mereka.

Di antara Mesir dan Turki pun terlihat adanya perubahan arah diplomasi sejak 2013

hingga 2020. Pemutusan hubungan diplomatik masih berjalan, hari ini Mesir dan Turki terlihat untuk memulai rekonsiliasi karena Pemerintahan Ankara membutuhkan dukungan Mesir dalam proyek pipa Gas di Laut Tengah. Di satu sisi, situasi ekonomi antar kedua negara yang dilanda inflasi sepanjang 2022 membutuhkan politik yang mengarah ke pragmatis daripada mementingkan idealisme dan ego masing-masing. Peran Qatar pun terlihat dalam mendamaikan hubungan Mesir dan Turki di saat Emir Hamdan tersenyum melihat Presiden Erdogan berjabat tangan dengan Abdul Fattah Sisi disela suksesnya pembukaan *World cup 2022* di Qatar sebagai tuan Rumah. Dari berbagai hal analisis, hal ini akan menjadikan diplomasi dan situasi geopolitik kedepannya lebih menarik dan menuju kepada perubahan yang lebih baik antara ketiga negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaziz, Salma dan Steve Almasy. (2013). "Egypt's Interim Cabinet Officially Labels Muslim Brotherhood a Terrorist Group" <https://edition.cnn.com/2013/12/25/world/africa/egypt-muslim-brotherhood-terrorism/index.html> diakses pada 22 Desember 2022.
- Augustyn, Adam. (2022). "President of Egypt" <https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Morsi> di akses 23 Desember 2022
- Aljazeera. (2018). "Qatar-Gulf Crisis: All The Latest Update". Diakses Melalui <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/28/qatar-gulf-crisis-all-the-latest-updates-week-1> pada 25 Desember 2022.
- Baskan, B. (2019). *Turkey between Qatar and Saudi Arabia: Changing Regional and Bilateral Relation*. Istanbul: Uluslararası İlişkiler.
- Davutoglu, Ahmed. (2001) *Strategic Depth, Turkey's International Position Stratejik*. Istanbul: Kure Yayinlari.
- Dugis, V. (Ed.), (2018). *Teori Hubungan Internasional : Perspektif-Perspektif Klasik*. Edisi Revisi. Airlangga University Press.
- Fromherz, Allens James. (2017). *Qatar: Rise to Power and Influence*. London: Tauris.
- Imad, K Harb. (2021). "Saudi Arabia ends The GCC Crisis" <https://arabcenterdc.org/resource/saudi-arabia-ends-the-gcc-crisis/> di akses pada 24 desember 2022
- John, Duke Anthony. (tt) "Qatar Profile, History"

- <https://www.britannica.com/place/Qatar/History> di akses pada 23 Desember 2022
- Laçiner, Sedat. (2011) "The Democratic Foreign Policy Approach (1950-1960)", USAK Yearbook, Vol.4. di akses pada 25 Desember 2022
- Memo. (2022). <https://www.middleeastmonitor.com/20220601-15-years-in-prison-for-al-jazeera-journalist-disgrace-says-network/> di akses pada 23 Desember 2022
- Meral. (2014). "Turkey and Egypt: Misconceptions & Missed Opportunities". Dalam *The Tahrir Institute for Middle East Policy*: <https://timep.org/commentary/analysis/turkey-egypt-misconceptions-missedopportunities/> di akses pada 24 Desember 2022
- Mohammed, Abu Zaid. (2022). "Al-Sisi Thanks to Saudi Arabia and UAE for Their Support" <https://www.arabnews.com/node/2103286/middle-east>. di akses 23 Desember 2022
- Roberts, D. B. (2017). *Qatar: Securing the Global Ambitions of a City-State*. London: Hurst & Company.
- Reuters. (2014). "Egypt Summons Qatari Envoy After Criticisms of Crackdown" <https://www.reuters.com/article/us-egypt-brotherhood-qatar/idUKBREA0304W20140104> diakses pada 22 Desember 2022
- Shaimaa, Magued. (2018). "The Egyptian Muslim Brotherhood's Transnational Advocacy in Turkey: a New Means of Political participation", *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol.45, No.3 p.480-497. di akses pada 22 Desember 2022
- Sujbto, Bernardo J. (2017). "Menunggu Peran Turki Dalam Krisis Qatar" diakses melalui <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/menunggu-peran-turki-dalam-krisis-qatar/> pada 25 Desember 2022.
- Szalanska. (2011). "Future Perspective of Turkey-Egypt Relations". diakses dari Bilgesam : <http://www.bilgesam.org/en/incele/1441/-future-perspectivesof-turkey-egypt-relations/#.XMI9pegzbiU> di akses pada 23 Desember 2022
- Union, Amanda. (2018). "Arab Spring History" <https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring> di akses pada 23 Desember 2022.